

**ANALISIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
MENGUNAKAN *INTERNAL AUDIT-CAPABILITY MODEL*
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo)**

Anggie Pramai Sella
Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA
Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas Brawijaya
Malang
Email: anggiepramais03@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify the capabilities of Government Internal Supervisory Apparatus in the inspectorate of Sidoarjo regency, to identify obstacles faced by the inspectorate in improving its supervisory management, and to determine efforts to improve the capability of the apparatus. This qualitative case study uses primary data from observation, documentation, and interviews and secondary data. This study finds that the capability of the inspectorate of Sidoarjo regency is on level 3 with notes. The inspectorate is still struggling with poor infrastructure, auditor's consistency, auditor's and regional head's commitment, human resource, and budget. Therefore, the inspectorate should build more facilities, increase human resource's competence, establish tiered review controls, provide rewards (package systems), reduce independency, hire more auditors, and increase its budget.

Keywords: Capability, Government Internal Supervisory Apparatus, Inspectorate, Internal Audit Capability Model

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan tata kelola pengawasan, serta mengidentifikasi upaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan merupakan data primer diantaranya dari hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo saat ini berada pada level 3 dengan catatan. Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya sarana prasarana, kurangnya konsistensi auditor, kurangnya komitmen Auditor dan Kepala Daerah, kurangnya Sumber Daya Manusia, dan anggaran yang belum memadai. Upaya untuk meningkatkan kapabilitas yaitu membangun sarana prasarana, meningkatkan kompetensi, pengendalian rewiu berjenjang, pemberian *reward* (sistem paket), mengurangi independensi, menambah SDM Auditor, dan menambah jumlah anggaran.

Kata kunci: Kapabilitas APIP, Inspektorat, *Internal Audit Capability Model*

PENDAHULUAN

Adanya peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola pemerintah daerah. Semakin meningkatnya kritisi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah dan aparatur pemerintahan. Semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat atas pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Sebuah praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas sesuai prinsip dasar pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada sektor publik.

Suatu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, pemimpin pemerintah baik di pusat maupun daerah wajib melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di dalam Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi konsep 5 unsur pengendalian intern dari *General Accounting Office* (GAO) yang mengacu kepada *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), yaitu: 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*), 2) Penaksiran risiko (*risk assessment*), 3) Aktivitas pengendalian (*control activities*), 4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan 5) Pemantauan (*monitoring*). Masdan *et al* (2015) menyatakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan amanah sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu APIP berperan secara efektif dalam memberikan layanan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*).

APIP merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa APIP pada setiap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi. Hal tersebut menyebabkan adanya keberagaman level kapabilitas APIP di Indonesia. Peningkatan kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model*

(IACM), sebuah model yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. Di dalam konsep IACM terdapat lima tingkatan kapabilitas yaitu Level 1 (*Initial*) sampai Level 5 (*Optimizing*). Pada setiap tingkatan kapabilitas terdapat enam proses elemen audit internal yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

IACM juga dapat dinilai sendiri (*self assessment*) oleh masing masing APIP dengan elemen kunci tertentu dan telah lengkap dengan langkah-langkahnya untuk peningkatan levelnya yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP. APIP dituntut untuk memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai. BPKP Provinsi Jawa Timur dalam laporan hasil bimbingan teknis dan asistensi tahun 2018 menyatakan bahwa banyak pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur level kapabilitas APIP berada dibawah level 3. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo belum bisa mencapai target pencapaian Level untuk tahun ini yaitu level 3. BPKP menyatakan bahwa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis 2015-2019, Pemerintah Republik Indonesia menargetkan seluruh kapabilitas APIP di Indonesia pada tahun 2019 berada pada Level 3.

Penelitian yang terkait dengan analisis peningkatan kapabilitas APIP pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Setiawan (2015) melakukan evaluasi kapabilitas audit internal pada Inspektorat Kota Palembang dan Level kapabilitas audit internal Inspektorat berada pada level 2 (*Infrastructure*) dengan catatan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Heriyanto (2016) mengidentifikasi elemen audit yang belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang terkait dengan level kapabilitas audit internal Inspektorat berada pada Level 2 (*Infrastructure*). Penelitian Santoso (2017) mengenai penilaian mandiri atas kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur terkait dengan Level

kapabilitas audit internal menyatakan Inspektorat masih berada pada Level 1 (*Initial*).

Inspektorat Kabupaten Sidoarjo belum mengidentifikasi terkait dengan hambatan dalam meningkatkan elemen audit internal atau tata kelola pengawasan serta upaya apa yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan elemen audit internal yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kondisi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan tata kelola pengawasan dalam perspektif IACM dan upaya yang diperlukan untuk mempertahankan serta meningkatkan level kapabilitas APIP sehingga pemetaan tersebut dapat membantu Inspektorat meningkatkan tugas dan fungsinya di lingkungan Pemerintah, dengan judul penelitian “Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menggunakan Internal Audit-Capability Model (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kapabilitas

Pengertian kapabilitas yang diambil dari beberapa sumber. Pengertian kapabilitas menurut kamus bahasa Indonesia (2014) yaitu Kapabilitas, artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (*skill*) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Baker dan Sinkula (2005), kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif. Berdasarkan pengertian kapabilitas yang telah diungkapkan, maka dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki lebih dari hanya keterampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang

diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam pasal 58 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan Presiden menyelenggarakan SPIP dalam rangka pengelolaan keuangan negara dengan baik. Sistem pengendalian internal adalah sebuah proses yang integral dengan adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pegamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Internal Audit

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Boynton & Johnson (2006) menyatakan internal audit merupakan bagian dari fungsi monitoring pada pengendalian internal yang menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP untuk pengawasan intern diartikan bahwa seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai. Bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Internal Audit Capability Model (IACM)

Model kapabilitas pengawasan intern atau IACM adalah sebuah model yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) dalam mengidentifikasi aspek-aspek fundamental untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik untuk

memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. Sebagaimana diketahui kerangka pikir (*logical framework*) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh IIA. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumusan yang mendasari IACM ini bahwa proses dan praktek tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus (BPKP, 2011). Area proses kunci (*Key Process Area/KPA*) merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi siapa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu belum meningkatkan pada level berikutnya.

Semua elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Di dalam model IACM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Semakin tinggi levelnya semakin baik kapabilitas APIP tersebut.

Peningkatan Kapabilitas APIP di Indonesia

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2015 menargetkan pada tahun 2015 adanya Grand design dan Road Map peningkatan kapabilitas APIP yang berada di level 2 adalah 100% atau seluruh APIP Pusat dan Daerah. Hasil pemetaan kapabilitas APIP oleh BPKP menggunakan pendektan IACM pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa sekitar 94% auditor internal pemerintah masih berada pada tingkat keahlian pemula sehingga dianggap tidak mampu mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan *assesment* terhadap 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP pusat dan 542 APIP daerah). Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% berada pada level 1,69 APIP atau 14,56 % berada pada level 2 dan hanya 1 APIP atau (0,21%) berada pada level 3.

Pemerintah di dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2015-2019 secara khusus telah memasukan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan yang

kemudia dipertegas oleh presiden RI. Salah satu perintah Presiden Jokowi adalah target kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada akhir tahun 2019 berada pada level 3 yang didukung dengan keluarnya peraturan Kepala BPKP RI No 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2015-2019.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dipilih menjadi objek penelitian karena organisasi tersebut atau APIP memiliki peran besar terhadap pemerintahan daerah untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Metode analisis data Sugiyono (2015:85) yang terdiri atas *data reduction*, *data display*, dan *drawing conclusion* yang dikembangkan dengan menggali keenam elemen peningkatan kapabilitas APIP untuk menemukan hambatan yang dihadapi. Dan peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk mengukur keabsahan data.

HASIL PENELITIAN

Kondisi Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2016, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo masih berada di level 2. Pada tahun 2017, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses menyusun infrastruktur pada level 3 seperti merevisi *Internal Audit Charter*, kebijakan-kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Kendali Mutu, *Quality Assurance and Improvement Program* dan perencanaan pelatihan, kertas kerja pengelolaan kualitas audit dan lainnya. Pada tahun 2018 ini, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya untuk peningkatan kapabilitasnya dan pada saat ini Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah berada pada level 3 dengan catatan, yang artinya belum seluruh elemen pada level 3 dapat dipenuhi. Dan masih terdapat hambatan yang dihadapi untuk

dapat mencapai level 3 sesuai dengan target nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Hambatan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil penelitian yang dilakukan hambatan dalam peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yaitu:

- 1) Kurangnya dukungan sarana prasarana
- 2) Kurangnya konsistensi Auditor
- 3) Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan APIP
- 4) Kurangnya SDM
- 5) Anggaran yang belum memadai

Upaya Mempertahankan dan Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kewajiban dan fungsinya yaitu melalui peningkatan kapabilitas APIP yang sudah menunjukkan kemajuan dari tahun 2015. Upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut.

- 1) Membangun sarana prasarana agar kegiatan pengawasan berlangsung dengan baik
- 2) Meningkatkan Kompetensi melalui diklat (Khusus STAR), telaah sejawat, hubungan antar APIP, kegiatan Bimtek, dan Workshop APIP.
- 3) Melakukan Pengendalian Reviu Berjenjang yaitu kegiatan reviu kompetensi auditor sesuai jejang pendidikan, sertifikasi, dan jabatan auditor.
- 4) Memberikan *reward*/ penghargaan dengan sesuai jenjang banyaknya penugasan (sistem paket).
- 5) Mengurangi adanya independensi (intervensi) antara Kepala Daerah dan APIP agar tercapainya pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.
- 6) Menambah jumlah SDM Auditor.
- 7) Menambah jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Inspektorat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Membangun sarana prasarana agar kegiatan pengawasan berlangsung dengan baik.
2. Meningkatkan Kompetensi melalui diklat (Khusus STAR), telaah sejawat, hubungan antar APIP, kegiatan Bimtek, dan Workshop APIP.

3. Melakukan Pengendalian Reviu Berjenjang yaitu kegiatan reviu kompetensi auditor sesuai jejang pendidikan, sertifikasi, dan jabatan auditor.
4. Memberikan *reward*/ penghargaan dengan sesuai jenjang banyaknya penugasan (sistem paket).
5. Mengurangi adanya independensi (intervensi) antara Kepala Daerah dan APIP agar tercapainya pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.
6. Menambah jumlah SDM Auditor. Kurangnya SDM dalam beberapa auditor yang sudah dipindahkan ke lingkup organisasi pemerintahan yang lain sehingga belum terdapat SDM baru.
7. Menambah jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Inspektorat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan saran bagi penelitian berikutnya untuk menambah jumlah informan dari Tim BPKP agar hasil pendapat mengenai pertanyaan penelitian lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah. 2013. Standar Audit Pemerintah Indonesia.
- Aikins, S. K. 2011. An Examination of Government Internal Audits' Role In Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*. Volume 11, Number 4, pp. 306-337 2011.
- Arens, Alvin A. et al. 2009. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach An Indonesian Adaptation*. Singapore: Prentice Hall.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2011). *Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Laporan Hasil Bimtek dan Asistensi*

Nomor LBINAPIP-666/PW13/6/2018 tanggal 4 September 2018.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019*.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis 2015-2019*. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/15060/5/Kapabilitas-APIP-Tahun-2019-Harus-Level-3-.bpkp>. di akses pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 23.00.

Boynton, Johnson, Kell. 2003. *Modern Auditing Jilid II, Edisi ke-7*. Jakarta: Erlangga.

Boynton, W. C. and Johnson, R. N. 2006. *Modern Auditing: Assurance Services and The Integrity of Financial Reporting (8th edition)*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Effendi, M. Arief. 2006. “Perkembangan Profesi Internal Audit Abad 21” Paper disampaikan pada kuliah umum di Universitas Internasional Batam, Senin 11 Desember 2006. Available on-line at <http://muhariefeffendi.wordpress.com>. 2007. Dan “Tantangan untuk Menjadi Seorang Auditor Internal yang Profesional” Paper disampaikan pada kuliah umum di STIE Trisakti, 8 Desember 2007, Jakarta. Available on-line at <http://muhariefeffendi.wordpress.com>.

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Heriyanto, Tommy Indra,. (2016). *Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan standar IACM pada Pemerintahan Kota Padang Panjang* (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.

IFAC. 2001. *Governance In The Public Sector: A Governing Body Superior Performance*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Imron, Al iim. 2009. *Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*.

<https://iimrsch.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.40 WIB

Inansyah. 2009. *Peranan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Organisasi*. Widyaaiswara Pertama Pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Padang. <https://bdkpadang.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 13.59 WIB

Lumbantobing, Joshua H. R., Saerang, David Paul Elia., & Wokas, Heince,. (2015). Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*. Vol 6 No 1

Masdan, Susan Rabbany., Ilat, Ventje., & Pontoh, Wiston,. (2017). Analisis Kendala-Kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*. Vol 8 No. 2.

Moeller, Robert R. 2005. *Brink’s Modern Internal Auditing 6th Edition*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malalui <http://www.google.com> diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 16.03 WIB

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah*.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di*

- Santoso, Hery. (2017). *Penilaian Kapabilitas APIP Dengan Internal Audit Capability Model (IACM) (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Jombang)* (Tesis tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sekaran, Uma. (2009). *Research Method For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2010). *Research Method For Business Fifth Edition*. United Kingdom: Wiley
- Setiawan, Yudhi (2015) *Evaluasi Kapabilitas Apip Menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) Sebagai Pengawasan Intern Yang Efektif (Studi Kasus Pada Auditor Internal Inspektorat Kota Palembang)*. Tesis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal focus bisnis*. Vol 14, No 02 Bulan Desember 2014.
- Tobing, Daniel Saleppang,. (2016). Kapasitas aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Sidoarjo (Kajian terhadap kompetensi aparat Inspektorat di kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. JIAP Vol 2, No 1 pp 11-18.
- Wijiharstuti, Ratna,. (2015). *Impementasi Kebijakan Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta* (Tesis Tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Studi Kebijakan Sekolah